



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT BINJAI SMARTCITY

Hukeria Harianja

Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo (BBPSDMP) Medan
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
huke001@kominfo.go.id

ABSTRACT

Public policy is the main asset that the government has to organize many people's lives in various aspects of life. presently, the Binjai City Government has a public policy in implementing the Binjai Smart City e-Government, namely e-musrenbang, e-budgeting, e-sippadu, e-appointment and e-community. Basically, the implementation of the Binjai Smart City e-Government is a series of activities that have generally been thought, designed and formulated and decided upon by the Binjai City Government. But, the facts on the ground often show that these policies unsuccessful to achieve their goals. The research method of this study is descriptive qualitative by analyzing secondary data from various sources of information from sources, documents, print media, the internet, laws and regulations, and other literature. The analysis shows that the public policies of the Binjai City Government in implementing the e-government of Binjai smartcity, namely e-musrenbang, e-budgeting, e-sippadu, e-appointments and e-people in general are still not effective so that the benefits of the policy dont really have an impact on the people of Binjai City. Likewise, the efficiency of the Binjai smartcity e-government policy, there are still many obstacles that the Binjai City Government must find a solution to, both related to budget, technology and human resources. E-society is the public policy most widely used by the people of Binjai City among the existing programs in Binjai City in implementing e-Government in Binjai City.

Keywords : Public Policy, e-Government Binjai Smart City

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan kota baik segi fisik, maupun masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan berbagai stakeholder yang berakibatkan tidak hanya dapat diselesaikan oleh Pemerintah sendiri melainkan butuh peran dari berbagai pihak. Permasalahan tingkat kepadatan yang tinggi merupakan suatu hambatan untuk mencapai kualitas hidup yang mudah dan sehat pada suatu perkotaan. Karena itu kota harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk yang timbul.

Kemajuan zaman seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi suatu terobosan baru yang digunakan oleh kota untuk memberikan layanan maksimal mungkin bagi penduduknya. Pemerintah harus tanggap dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengambil kebijakan publik secara cepat, tepat, mudah, nyaman dan terpercaya. Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014) mendefinisikan “ Public Policy is whatever the government chose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai modal utama karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberi kepuasan masyarakat adalah salah satu tujuan antara yang sangat penting dan sekaligus indikator pencapaian sebuah tujuan publik. (Budiman Rusli, 2013).

Bahkan Chandler dan Plano dalam (Pasalong, 2013) beranggapan bahwa : “kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan”. Maka dapat dilihat dari Chandler dan Plano ini bahwa



memecahkan masalah publik harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, bukan hanya itu mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mengatur supaa seluruh masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi seiring jalannya pemerintahan, meski ada pula yang mungkin beberapa pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dipilih atau dikembangkan oleh lembaga atau badan-badan usaha milik negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu dimana pelayanan pemerintah berbasis internet atau online mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga muncul konsep salah satunya Smart City. Hal ini berarti konsep Smart City merupakan pelayanan publik dari tindak lanjut penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masalah dan kepentingan masyarakat.

Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial dan pada masalah-masalah prioritas. Smart City merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun kota yang tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang dominan dan memegang kendali dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni (Muliarto, 2015). Penerapan Smart City (Kota Cerdas) merupakan praktiknya Good Governance dalam meningkatkan pelayanan publik terutama melalui pemanfaatan teknologi e-government yang bertujuan dalam pembangunan Kota.

Kini Smart City sudah diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Makin banyaknya kota atau daerah di Indonesia yang menerapkan Smart City diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan pemukiman kumuh, layanan publik yang tidak memuaskan, angka kejahatan yang meningkat, sampah, banjir, kemacetan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Smart City merupakan integrasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Binjai menjadi kota pertama di Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan smart city atas dasar Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai dan juga merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahun 2016-2021. Saat ini Pemerintah Kota Binjai telah memiliki kebijakan publik dalam menerapkan e-Government Binjai Smart City yaitu e-musrenbang, e-budgeting, e-sippadu, e-appointment dan e-masyarakat. Aplikasi e-Government Binjai Smart City merupakan sebuah kebijakan publik dari Pemerintah Kota Binjai sebagai pelayanan pemerintah berbasis internet atau online yang menjadi impian bagi kota-kota besar di dunia. Namun permasalahannya adalah sejauhmana kebijakan Pemerintah Kota Binjai dalam menerapkan Aplikasi e-Government Binjai Smart City sebagai sarana dalam memberikan informasi yang cepat, tepat mudah, nyaman dan terpercaya kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya.

Pada dasarnya kebijakan publik yang telah diputuskan oleh Pemerintah Kota Binjai merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya telah dipikirkan, didesain dan dirumuskan. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan Pemerintah Kota Binjai tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat melenceng dari



apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlunya suatu analisis kebijakan publik dalam penerapan e-Government Binjai Smart City. Di dalam kajian ini, kriteria yang ditetapkan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan publik dalam penerapan e-Government Binjai Smart City hanya menggunakan kriteria efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency) sesuai yang dipaparkan oleh William Dunn (dalam Subarsono, 2011) mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut : efektivitas (effectiveness), ketercukupan (adequacy), efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), kersponsifan (responsiveness), dan kelayakan (appropriateness).

TINJAUAN PUSTAKA

E-Government

Menurut Zainal Abidin (2012) mendefinisikan e-government dimaknai dengan suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah. Dalam praktiknya sehari-hari, e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyedia pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kementerian Kominfo memberikan definisi e-government sebagai aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Pada dasarnya e-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. (sumber: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8554/implementasi-penerapan-egoverment/0/sorotan_media) Sementara Pemerintah sendiri memberikan kebijakan e-government melalui INPRES No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan tujuan utamanya adalah peningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Bermula dari dikeluarkannya instruksi presiden tersebut, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan dengan menampilkan sistem pemerintahan melalui online.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi dari narasumber, dokumen, media cetak, internet, peraturan perundangan, dan literatur lainnya. Menurut Sugiyono (2016) jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

E-Government Binjai Smart City merupakan produk kolaborasi Pemerintah Kota Binjai bersama Politeknik Negeri Medan sebagai perancang website serta fitur di dalamnya, kemudian PT. Telkom Indonesia sebagai penyedia sarana jaringan, dan PT. Bank Negara Indonesia sebagai mitra dalam membuat Binjai Card yang memiliki fungsi terintegrasi sama halnya seperti ATM.



Pembagian kategori dari e-Government adalah Pemerintah ke Pemerintah, Pemerintah ke Masyarakat dan Pemerintah ke Dunia Usaha. Aplikasi E-Government Binjai Smart City terdiri dari :

1. e-Musrenbang,

Kebijakan publik dalam penerapan e-Musrenbang Kota Binjai memberikan informasi kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang transparan dan terpercaya. Namun sayangnya, e-Musrenbang Kota Binjai dirasakan kurang efektif. Usulan-usulan masyarakat yang telah ditampung dalam aplikasi tidak dapat diketahui apakah usulan tersebut diterima atau tidak untuk direalisasikan dan kapan terealisasinya, dengan kata lain e-Musrenbang Kota Binjai hanya sebatas media menampung aspirasi masyarakat saja. Efek e-Musrenbang tidak tergambar dengan jelas. Selain itu, e-Musrenbang Kota Binjai merupakan sebuah website musyawarah dan perencanaan yang berfungsi menampung usulan-usulan masyarakat kota Binjai. Saat ini masyarakat Kota Binjai dapat memberikan usulan-usulan dalam kategori fisik maupun non fisik dari kecamatan, opd, masyarakat, serta Reses DPR secara online. Pada dasarnya tujuan-tujuan e-Musrenbang Kota Binjai sudah efisien sehingga hemat waktu, tenaga dan biaya sebagai wadah dalam menampung usulan-usulan masyarakat Kota Binjai.

2. e-Budgeting

Konsep e-budgeting diartikan sebagai sistem keuangan yang berupa seluruh dokumentasi keuangan perusahaan atau bisnis yang ditampilkan secara online dan bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki kebutuhan atau kaitan di dalamnya. Anggaran elektronik ini disusun dalam aplikasi komputer berbasis web dan dirancang sebagai fasilitas proses penyusunan anggaran belanja. E-budgeting merupakan kebijakan publik dari pemerintah Kota Binjai untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, mudah dan akurat dalam budgeting. Transparansi anggaran Kota Binjai dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau masyarakat Kota Binjai khususnya. Tujuan penerapan e-budgeting tak lain untuk kesejahteraan masyarakat, menutup celah korupsi dan pemborosan anggaran serta lebih efisien biaya dan waktu. Oleh karenanya, komitmen pemerintah Kota Binjai mutlak diperlukan penerapan kebijakan e-budgeting.

Namun realitanya saat ini kebijakan e-budgeting Binjai tidak efektif dan tidak dapat lagi diakses sehingga sekarang ini efek transparansi dan akuntabilitas tidak tercapai di kota Binjai, padahal e-budgeting berdasarkan penelitian Anggi Pratama Nasution, & Atika (2019) diketahui bahwa sebesar 13,5% responden menyebutkan impelentasi Transparansi cukup tercapai pada Pemerintah Kota Binjai dan 86,5% responden menyatakan transparansi telah tercapai pada Pemerintah Kota Binjai.

3. e-Sippadu

Sistem informasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disebut Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (sippadu). Konsep e-sippadu ini merupakan suatu sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Kehadiran layanan e-sippadu sebagai salah satu langkah dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan juga untuk mempersingkat waktu serta diharapkan bisa mengurangi kemungkinan adanya pungutan liar dalam mengurus perizinan.

Pelaksanaan kebijakan program e-sippadu yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai saat ini sudah berjalan dengan baik namun terkadang belum efektif. Aplikasi digunakan hanya untuk mengusulkan pendapat atau saran yang masih kurang, karena di dalam pelaksanaan e-sippadu saat ini masih ada



kendala beberapa pemilik usaha yang masih belum mengerti dan memahami cara aplikasi e-sippadu sehingga instansi terkait harus memberikan arahan yang jelas kepada para pemilik usaha di Kota Binjai. Kebijakan dalam penerapan aplikasi e-sippadu belum dirasakan efek kemudahan dan kenyamanan bagi pemilik usaha.

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan tidak dipublikasikan secara terbuka sehingga tidak mudah diakses oleh para pengguna atau stakeholders lainnya. Kebijakan publik yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai ini tidak efisien menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon izin atau investor.

4. e-Appointment

Untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang cerdas, pemerintah Kota Binjai meluncurkan aplikasi e-appointment yang saat ini di kenal dikota Binjai dengan nama elektronik dokter yang selanjutnya disebut dengan e-dokter. Kebijakan aplikasi e-dokter merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari dokter spesialis yang ada di Kota Binjai.

Di dalam aplikasi e-dokter terdapat 12 fasilitas kesehatan terdaftar dalam BPJS diantaranya 5 unit Rumah Sakit salah satu diantaranya RSUD Dr. RM. Djoelham yang merupakan Rumah Sakit milik pemerintah Kota Binjai, kemudian 8 unit Puskesmas di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat I masyarakat yang tercatat sebagai peserta BPJS di Kota Binjai serta menyediakan 138 dokter-dokter spesialis dan umum yang tersebar di Kota Binjai.

Kebijakan meluncurkan aplikasi ini secara khusus dibuat oleh Pemerintah Kota Binjai untuk seluruh masyarakat Kota Binjai yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan konsultasi dengan dokter spesialis yang ada di Kota Binjai. Masyarakat dapat membuat janji kunjungan berobat tanpa harus ikut antrian di tempat. Pemerintah Kota Binjai menerapkan kebijakan publik dengan menggunakan e-dokter agar masyarakat tidak perlu mengantri terlalu lama di Rumah Sakit ataupun Puskesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun kebijakan tersebut belum secara maksimal digunakan oleh masyarakat Kota Binjai, karena masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna aplikasi, dengan menyertakan nomor BPJS, nomor KTP, alamat email dan password. Bahkan sistem e-dokter selalu didapati dalam keadaan sibuk dan sulit diakses oleh masyarakat Kota Binjai. Selain itu, manfaat e-dokter masih terlihat di satu rumah sakit saja, pentingnya pelatihan dan sosialisasi terhadap sumber daya manusia dalam mengakses e-dokter yang masih kurang paham.

5. e-Masyarakat

Aplikasi e-Masyarakat adalah aplikasi berbasis online mengenai pengaduan masyarakat yang hanya bisa diunduh umum di Play Store dan diakses oleh masyarakat Kota Binjai dengan memasukkan nomor KTP setempat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Binjai Command Center sebagai pusat database dan monitoring. Masyarakat bisa membuat laporan yang dilengkapi dengan foto dan keterangan supaya segera ditanggapi. Selain menjadi media berbagi informasi, e-Masyarakat juga digunakan kepolisian dan masyarakat untuk berkorespondensi.

Kebijakan program e-Masyarakat merupakan salah satu kebijakan publik dari Walikota Binjai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah Kota Binjai dengan masyarakat Kota Binjai dalam upaya mencari pemecahan masalah pelaksanaan pembangunan kota Binjai. Pada umumnya kebijakan publik e-Masyarakat banyak mendapat respon baik dari masyarakat dan efektif meskipun ada banyak kendala-



kendala baik dari pengelola maupun pengguna aplikasi dan sampai sekarang belum menemukan solusi. Seluruh informasi terbaru bisa diketahui Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga lebih efisien waktu, tenaga, biaya dan dengan leluasa memberikan masukan, saran, serta kritik terkait perkembangan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Binjai. Masyarakat dengan sendirinya sudah mampu memposisikan dirinya sebagai kontrol sosial secara langsung demi menjamin roda pembangunan berjalan dengan optimal. Kebijakan publik e-Masyarakat yang ce-pat dan tepat sasaran menjadi hal yang penting untuk diwujudkan pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik Pemerintah Kota Binjai dalam penerapan e-government Binjai smartcity yaitu e-musrenbang, e-budgeting, e-sippadu, e-appointment dan e-masyarakat pada umumnya masih belum efektif sehingga manfaat kebijakan tidak begitu berdampak pada masyarakat Kota Binjai. E-masyarakat kebijakan publik ini menjadi salah satu program yang paling banyak digunakan masyarakat Kota Binjai diantara program-program yang ada di Kota Binjai dalam penerapan e-Government di Kota Binjai. Begitu juga efisiensi kebijakan e-government Binjai smartcity juga masih banyak kendala yang harus dicari solusinya oleh Pemerintah Kota Binjai, baik itu terkait dengan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia. Efisiensi kebijakan publik dalam penerapan e-government Binjai smartcity apabila penggunaan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia secara minimum digunakan untuk mencapai hasil yang optimum. Akhirnya suatu kebijakan e-Government Binjai smartcity diyakini menjadi solusi untuk menjawab persoalan pelayanan publik yang tujuannya yaitu dapat meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Binjai.

Kebijakan Pemerintah Kota Binjai dalam penerapan e-government Binjai smartcity selain kerja sama yang baik di berbagai pihak diperlukan juga kebersamaan visi dan misi yang benar-benar mau mengedepankan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya sosialisasi kebijakan publik dalam penerapan e-government Binjai smartcity yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Binjai sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri serta mengaplikasikan pengetahuan seputar penerapan e-government Binjai smartcity kepada masyarakat dan stakeholders terutama di Kota Binjai.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Anggi Pratama & Atika (2019). *Implementasi e-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai*, Vol. 9 No.2
- Budiman Rusli (2013), *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Cimahi
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Muliarto, H. (2015). *Konsep Smart City Smart Mobility*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., Batubara, S. S., Syah, D. H., & Alpi, M. F. (2020). *Identifikasi Strategi Keberhasilan Layanan E-Government Di Kota Medan*. Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, 11(2), 106-112.



- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. In *Seminar Nasional Taman Siswa Bima* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-153).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai tahun 2016-2021.